



JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA

e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857

Website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>

Faculty of Politics Governance, Governance of Home Affairs (IPDN)

JPPDP, Vol 15 No. 1

Doi: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.2195>

FAKSI DAN KONFLIK POLITIK DALAM PARTAI POLITIK: PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Hilda Wahyuni¹, Rizqa Febry Ayu^{2*}

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: hildawahyuni578@gmail.com¹, rizqa9732@gmail.com²

*corresponding author

E-mail: rizqa9732@gmail.com

Abstract

The collapse of the new order became a reflection for political parties in strengthening and expanding their political power to appear on the surface as a democratic spirit that began to develop in Indonesia. This became an opportunity for the Partai Keadilan (PK) to compete by changing its name to the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) and experiencing significant developments in the political scene in Indonesia. The developments experienced by PKS triggered conflict within the party itself. The factions that emerged in the PKS party created conflicts that made political parties lack electability and had an impact on vote acquisition during general elections. This research is a library research with a qualitative approach which finds that political conflict in PKS can occur due to three things, namely political conflict to occupy political positions, conflicts resulting from policies and conflicts of opinion on political institutions. Efforts to resolve conflicts in political parties are resolved by means of deliberation by the party consultative assembly, if this does not work, then it can then be processed through legal proceedings to the district court and cassation at the supreme court.

Keywords: Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Faction, Political Conflict.

Abstrak

Runtuhnya orde baru menjadi refleksi bagi partai politik dalam memperkuat dan memperluas kekuatannya untuk tampil ke permukaan sebagai semangat demokrasi yang mulai berkembang di Indonesia. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi Partai Keadilan (PK) untuk berkompetisi dengan berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mengalami perkembangan yang signifikan dipentas perpolitikan di Indonesia. Perkembangan yang dialami PKS memicu terjadinya konflik di dalam partai itu sendiri. Faksi yang muncul pada partai PKS menimbulkan konflik yang membuat kurangnya elektabilitas partai politik dan berdampak pada perolehan suara ketika dilaksanakannya pemilihan umum. Riset ini merupakan studi kepustakaan (library

research) dengan pendekatan kualitatif yang menemukan bahwa konflik politik dalam PKS dapat terjadi karena tiga hal, yaitu konflik politik untuk menduduki jabatan politik, konflik akibat dari kebijakan dan konflik perbedaan pendapat tentang lembaga politik. Upaya penyelesaian konflik di partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah oleh Majelis Permusyawaratan Partai, jika hal tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya dapat di proses melalui jalan hukum ke Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Faksi; Konflik Politik.

PENDAHULUAN

Berakhirnya orde baru memberikan kesempatan kekuatan politik untuk tampil kepermukaan dan menumbuhkan semangat demokrasi yang mulai berkembang di Indonesia. (Esty E.,2015) Reformasi ditandai dengan mundurnya Soeharto dan terjadi kericuhan demonstran besar yang dilakukan mahasiswa. Adanya reformasi menuntut perubahan segala bidang baik kebebasan pers, kebebasan politik, serta adanya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (Kamsi, 2017) Dibukanya pintu demokrasi menjadi pendorong untuk mendirikan partai politik (parpol). Partai Keadilan (PK) salah satu yang muncul dan berganti nama sebagai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berasal dari gerakan tarbiyah kemudian meluas menjadi Lembaga Dakwah Kampus dan menjelma menjadi partai politik. Setiap partai pasti mengalami masalah baik itu konflik internal parpol maupun eksternal parpol yang harus diselesaikan. Parpol terdiri atas beberapa kelompok yang memiliki argumen berbeda dan saling

bersaingan. Setiap kelompok partai membawa cara pikir berbeda baik ideologi, visi, misi dan lainnya. Perbedaan sudut pandang ini yang menimbulkan faksi dan konflik sebuah partai politik yang sangat sulit dihindari dari perkembangan parpol.

Faksi partai adalah gejala sering terjadi dalam partai yang sulit untuk dihindari keberadaannya. Dapat dikatakan bahwa hampir semua partai di Indonesia telah menjadi korban faksi serius yang kadang berujung pada perpecahan. Terkadang partai politik juga tidak bisa mengelola rutinisasi perilakunya karena tercipta dysfunctional factionalism (disfungsional faksionalisme) di internal yang membuat partai politik sulit untuk menjadi aktor politik yang tunggal akibat pertarungan faksi-faksi (Efriza, 2012). Faksi didalam partai seringkali berujung pada eksodus sehingga adanya beberapa perpecahan dalam sebuah partai , kemudian perpecahan tersebut banyak yang mendirikan partai-partai baru yang selanjutnya dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas politik dan sistem kepartaian. (Rasid Pora, 2014)

PKS mengalami konflik yang memberikan dampak yang kuat terhadap kepercayaan pemilih sehingga membuat pemilih beralih untuk memilih partai lain. Adanya faksi membuat beberapa pihak dirugikan dan diuntungkan. Faksi yang muncul pada partai PKS menimbulkan konflik yang membuat kurangnya elektabilitas parpol dan berdampak pada perolehan suara ketika pemilu. Misalnya konflik PKS terkait dengan kasus Yusuf dan Fahri Hamzah yang muncul ke publik. Problematika tersebut menjadi pemantik bagi penulis, sehingga ingin membahas lebih rinci terkait bagaimana faksi, bagaimana konflik internal yang dialami PKS serta bagaimana upaya penyelesaian konflik tersebut.

METODE PENELITIAN

Kajian dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research). Penelitian pustaka, selain sebagai langkah awal kerangka penelitian juga digunakan untuk memperdalam kajian teori dalam penelitian ini. Riset ini, memanfaatkan sumber kajian pustaka sebagai upaya perolehan data penelitian. (Zed, Mestika, 2008) Data dan argumetasi yang ada dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan mengumpulkan berbagai referensi ilmiah

dari sumber sekunder baik melalui buku, jurnal, hasil penelitian, skripsi, tesis desertasi dan dokumen peraturan perundang-undangan ataupun dokumen dari organisasi partai politik. Penelitian merupakan kajian untuk memahami penyebab konflik yang terjadi dalam partai politik terkhusus pada PKS dan upaya dalam penyelesaian konflik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faksi Dan Konflik Internal Partai Politik

a. Pengertian Faksi dan Konflik

Partai politik kerap dilanda konflik internal memberi berdampak terhadap pelaksanaan fungsinya yang lebih berfokus untuk menyelesaikan konflik. Konflik adalah perbedaan kepentingan antara individu dengan individu lain terkait kepentingan politik sehingga menimbulkan konflik politik. Konflik politik dibagi menjadi tiga, yaitu konflik politik untuk menduduki jabatan politik, konflik akibat kebijakan, dan konflik perbedaan pendapat tentang lembaga politik. Dikutip dari tulisan Lili Romli bahwa Maurice Durverger berpendapat faksi merupakan kekuatan untuk bersaing sehingga memperoleh dominasi penting di sruktur partai terkait pengambilan keputusan partai dan menentukan calon untuk mengisi kursi

politik pemerintah. Di dalam tubuh parpol terdapat faksi yang merasa bersaing dengan faksi lain untuk mendapat perolehan kekuasaan yang lebih luas dan menjadi bagian di dalamnya. Koalisi dapat menjadi faktor konflik diantara partai politik terutama pilihan koalisi hanya untuk kepentingan jangka pendek.(Romli, Lili, 2017)

Kartini kartono mengutip pengertian konflik dari Clintion F. Frink, bahwa konflik merupakan keterkaitan psikologis yang berbenturan dengan tujuan dan tidak mampu secara langsung sehingga tidak bisa disatukan, anggapan sebagai musuh, dan nilai kontruksi berbeda. Konflik merupakan hubungan yang bertentangan terkait perilaku yang terlihat dengan perlawanan halus, terkendali, tidak terlihat dan tidak langsung kepada lawannya, hura-hara, perang, makar, gerilya, serta lainnya. (Kartono, Kartini, 2017) Faksi akan berubah menjadi faktor konflik internal partai jika lebih dominan kepentingan individu/kelompok dari pada adanya kesamaan dalam pandangan.

b. Penyebab Faksi dan Konflik Politik dalam Parpol

Dikutip dari jurnal politik mengenai penyebab faksi yang ditulis oleh Beller, Belloni, Zariski dan Ceron yang dikutip oleh Budiarti & Aisyah P.(2017) bahwa

penyebabnya. *Pertama*, persamaan keputusan nilai dan idiologi tertentu untuk diperjuangkan di dalam parpol. Faksi digunakan para kader untuk memperjuangkan nilai tertentu. *Kedua*, kerumitan aspek sosialogis para kader parpol sperti struktur kelas, pendidikan, usia dan lainnya. *Ketiga*, sistem politik dapat menyebabkan faksi, yaitu sistem kepartaian dan sistem pemilu. *Keempat*, pengelolaan sistem keuangan dan kampanye parpol di daerah. *Kelima*, adanya permasalahan terkait proses seleksi dan pemilihan internal parpol terutama kepengurusan partai. Proses pemilihan secara terbuka dan diberikan peluang yang sama kepada anggota parpol untuk meminimalisir konflik internal parpol. *Keenam*, gaya kepemimpinan parpol yang otonom dalam memutuskan perkara akan menimbulkan disiplin partai dan mencegah konflik, sedangkan pandangan lain berpendapat kepemimpinan otonom akan menimbulkan konflik semakin tajam akibat elit parpol cenderung menggunakan faksi pendukung keputusannya untuk memperkuat kepemimpinannya dan kekuasaan politiknya sendiri. (Budiarti & Aisyah P, 2017)

Faksi menyebabkan pesekongkolan sebagian pemimpin elit parpol untuk melindungi kepentingan. Hubungan patron-

klien diterjemahkan sebagai hubungan individu atau dua kelompok atau status ekonomi lebih tinggi (patron) yang memiliki pengaruh dan mem[unyai sumberdaya untuk melindungi atau memberi keuntungan kepada klenya sehingga akan memperoleh dukungan, bantuan, dan pengabdian kepada patronnya. Persoalan perpecahan di Indonesia, *pertama* yakni faktor kepemimpinan dan elit parpol bersifat pragmatis dan menominasi di dalam struktur parpol. Sehingga dapat menimbulkan faksi dan pembelahan ditubuh parpol dan juga terkait konflik internal parpol akibat proses pergantian pemimpin. *Kedua*, struktur organisasi partai. akibat faksi membuat konflik berdampak tidak terdistribusi posisi, jabatan strategis secara adil, dan desentralisasi kekuasaan di tingkat daerah. Terjadi timbah tindak kebijakan kepengurusan antara pusat dan daerah sehingga menyebabkan konflik di keduanya. (Budiarti, Aisyah Putri, 2018) Jadi, penyebab utama yang sering terjadi faksi dan konflik internal parpol termasuk kurangnya sistem kaderisasi partai terutama cara pandang yang berbeda oleh anggota partai dan adanya kepemimpinan dominan di struktur partai. Para kader harus ditanamkan nilai parpol yang seirama dengan kader lain untuk meminimalisir

faksi. Faksi tidak selamanya menyebabkan konflik internal, tetapi faksi juga mempengaruhi elit politik yang ingin dominan di tubuh parpol.

c. Penyelesaian Faksi dan Konflik Internal Parpol

Runtuhnya orde baru dibawah kepemimpinan otoriter Soeharto menjadi warna baru politik di Indonesia. Dibuka keran demokrasi Indonesia membangkitkan tumbuhnya parpol. Untuk mencegah terjadi konflik dan faksi parpol dengan dirancang undang-undang parpol yang diadopsi dengan metode dan strategi menghindari perpecahan. Undang-undang No. 31 Tahun 2002 diatur mengenai konflik dalam struktur kepengurusan ganda parpol. (*Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik*) Parpol yang mengalami konflik maka akan diselesaikan dengan melaksanakan musyawarah terlebih dahulu, jika gagal akan di tempuh lewat Pengadilan Negeri sebagai keputusan awal dan akhir, kemudian bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pengaturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, konflik diatur lebih lanjut terkait bentuk perselisihan dengan parpol lain. (*Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*) Penyelesaian perselisihan parpol yaitu

pertama, terkait musyawarah dijadikan prioritas penyelesaian. *Kedua*, jika tidak bisa diselesaikan maka ditempuh melalui proses Pengadilan Negeri dan penyelesaian perkara hukum paling lambat 60 hari, dan dapat di ajukan kasasi MA dengan maksimal 30 hari. *Ketiga*, melakukan mediasi, arbitrase, dan rekonsiliasi partai sesuai aturan AD/ART partai. Pengaturan parpol mengalami perubahan menjadi Undang-undang No.2 Tahun 2011 dengan membagi penuntasan konflik parpol. *Pertama*, penyelesaian internal oleh Mahkamah Partai (MPP) dan diatur di AD/ART. *Kedua*, jika penyelesaian secara internal tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan dapat melakukan kasasi ke MA. Adanya pengaturan formal mengenai konflik parpol dan perpecahan, tetapi masih terjadi perpecahan pada era reformasi.

Faksi di dalam parpol menyebabkan pembelahan di dalam tubuh parpol. Dan dapat menyebabkan terpecahnya elit politik menjadi beberapa kubu berdasarkan nilai yang berbeda sehingga tiap faksi memiliki potensi kuat untuk mendirikan parpol baru. Setiap partai politik akan mengalami konflik yang menyebabkan kurangnya solidaritas partai. Faksi dan konflik partai akan merugikan partai politik untuk melaksanakan tujuannya karena harus

mengutamakan penyelesaian konflik terlebih dahulu. PKS dari awal kemunculannya sering mengalami konflik internal parpol yang diselesaikan dengan dewasa tanpa mengumbar permasalahan ke permukaan.

d. Dampak Faksi dan Konflik bagi Partai

Menurut Kollner, Basedau dan Boucek bahwa faksi di dalam parpol mampu menjadikannya sebagai parpol yang inklusif karena beragam kelompok di tubuh parpol. Adanya faksi mampu menyeimbangkan kelompok dominan di dalam parpol. Terdapat keberagaman antara faksi di parpol meyebabkan pengambilan keputusan melahirkan kebijakan terbaik. Boucek berpendapat dengan adanya faksi akan terjadi perubahan yang mampu mempengaruhi fungsi partai dan berakibat kemunduran parpol dan menimbulkan perpecahan sehingga terbentuknya parpol baru. Menurut Kollen dan Basedau berpendapat bahwa faksi akan berdampak pada terbentuknya pemilihan kader dan pengisian struktur kepengurusan parpol kepada faksi tertentu. Dan mentebabkan kompetisi dan perselisihan antara faksi untuk mencari kekuasaan kelompok dan memajukan partai. dan menimbulkan tindakan koruptif yang dapat memberi keuntungan bagi faksi di dalam tubuh parpol.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sejarah Singkat Lahirnya PKS

Kader PKS banyak disisi aktivis dakwah dan intelektual muda terutama bergerak dari dalam kampus. Di dalam kampus mereka mendirikan pengelolaan kajian keagamaan yang di salurkan dengan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Pergerakan aktivis dilaksanakan dengan sembunyi dan jika melaksanakan pengajian dilakukan dengan mengatas namakan kegiatan mahasiswa atau siswa. (Rahmad, Imadun, 2011) PKS merupakan partai secara tegas menjadikan Islam sebagai idiologi politiknya. Politik yang dijalankan PKS mengacu pada aturan, doktrin, serta ajaran Islam. Menurut Imdadun Rahmat ada tiga pemahaman penerapan syari'at Islam dalam PKS, *pertama* pemahaman substansial mengenai penerepan syariat Islam. *Kedua*, pelaksanaan syari'at Islam dalam pengertian menjadikannya hukum formal yang tertuang pada Kebijakan Dasar PKS yang memperjuangkan pengundangan syari'at Islam di wilayah umat Islam siap menerimanya. *Ketiga*, penerapan syariat Islam secara parnipurna yang mencakup kemampuan politik yang *powerfull* untuk merealisasikan sehingga menjadikan

Islam sebagai referensi utama dalam bernegara sekaligus penguasa mayoritas. Kebijakan pada masa orde baru menekan terhadap pergerakan keagamaan sehingga cara pengajian ini dilakukan rahasia. Tahun 1998 para kader Tarbiyah membentuk partai politik bernama PK (Partai Keadilan) dan dibentuk pada 20 Juli 1998, kemudian PK transformasi menjadi PKS didirikan 20 April 2002. (Yuniarti, Titin, 2016)

PKS menjadikan Ihwanul Muslimin (IM) sebagai acuan gerakan politik dan mengadopsi pemikiran seperti *manhaj* dakwah dan keislamannya yang dipelajari sehingga menjadikan IM dalam acuan utama. Anggaran dasar IM yaitu menyatukan umat, melaksanakan dakwah Islam, menjaga kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan taraf rakyat. Tujuannya IM yaitu melaksanakan semua hukum dan ajaran Islam. (Rahmat, M.Imdadun, 2008) PK merupakan kelanjutan PKS pada masa reformasi yang menggunakan Islam sebagai asas dan menirukan gaya IM di adopsi dari luar negeri. PKS berhasil menampilkan program yang menarik perhatian pemilih, dapat dilihat bahwa PKS termasuk paling berhasil dibanding partai lain.

PKS memiliki visi menjadi "partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sedangkan misi dari partai PKS adalah “menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhai Allah subhanau wata’ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.(Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, Bab II, Pasal 5 Dan Pasal 6) Tujuan didirikannya Partai Keadilan Sejahtera, sebagaimana tercantum dalam AD/ART adalah “terpenuhinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap anggota sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.(Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, Bab III, Pasal 7)

Sejak dulu PKS menggunakan istilah presiden partai, untuk berikut dipaparkan perkembangan PKS dikelompokkan sesuai dengan pimpinan, yaitu:

- 1) Periode 1999-2000 (saat itu PK) dipimpin oleh Nur Mahmudi Ismail (termasuk deklarator partai). Pemilu 1999 PK masih partai baru dengan memperoleh kursi 1. 436. 561 (1.36%) suara dan mendapat 7 kursi di DPR RI, 21 kader di DPR Provinsi, dan 160 kader DPRD

Kabupaten/Kota. Dengan menggunakan slogan “Partai Islam Pilihan Umat Islam”. Hasil pemilu 1999 menempatkan PKS urutan ke-7 dari 48 parpol dan urutan ke-5 parpol Islam. Namun hasil pemilu 1999 tetap membuat PK tidak lolos *elektoral threshold* dan menyebabkan PK mengganti nama dengan Partai Keadilan Sejahtera.

- 2) Periode 2000-2004 dipimpin Hidayat Nurwahid sempat mengajukan gugatan ke MK mengenai peraturan *elektoral threshold* karena dianggap membatasi kebebasan parpol. Kemudian ditemukan alternatif lain dengan membentuk partai baru dengan mengganti nama PK menjadi PKS. Masa ini dipimpinnya oleh Almuzzamil Yusuf (2000-2003). Setelah melalui musyawarah memutuskan Hidayat Nur Wahid menjadi pemimpin partai dan Anis Matta sebagai sekjen. Tidak lama kemudian pemilu 2004, Hidayat Nurwahid terpilih menjadi ketua MPR dan mengundurkan diri dari presiden PKS. Perolehan suara PKS disebabkan adanya peralihan dukungan dari parpol Islam lain, bisa dicermati hasil perolehan suara PPP,

PKB, dan PAN mengalami penurunan pemilu 1999.

- 3) Periode 2004-2010 dipimpin Tifatul Sembiring dan Hilmi Aminuddin sebagai Ketua Majelis Syura. Sedangkan Anis Matta menjadi Sekjen PKS. Pada periode ini suara pemilu PKS dari tahun 1999-2004 mengalami peningkatan dengan dukungan simpatisan cukup besar. Kemudian adanya dukungan simpatisan para kader PKS, bekerjanya mesin parpol, solidaritas kader dan dukungan kader tarbiyah. PKS berhasil menempatkan 45 kadernya di DPR RI, 157 DPRD Provinsi, dan 900 di PRDP Kota/Kabupaten. Dalam meraup suara pemilu 2004 PKS menemukan persoalan yaitu PKS dianggap parpol Islam yang sangat kental sehingga tidak memperoleh suara non muslim di fokus daerah perkotaan khususnya Jawa dan sulit memperoleh suara di daerah yang minoritas muslim. Selama kepengurusan periode ini dikabarkan adanya kerenggangan antara Tifatul (kelompok tua konservatif) dan Anis (kelompok muda progresif). Adanya kudeta halus yang dilakukan Anis Matta untuk mengambil kedudukan

Presiden PKS dengan membentuk Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) dan pada akhirnya layu dengan ditolak mayoritas DPP PKS. Pemilu 2009 terjadi koalisi partai dengan Demokrat yang mengusung SBY dan Budiono sebagai paslon. Tifatul menjadi salah satu menteri Komunikasi dan Informasi, sehingga PKS menunjuk Lutfi Hasan Ishaq sebagai pejabat presiden sementara. (Nurdin, M.Amin, dkk, 2019) PKS dalam pemilu 2009 mendapat 10% (8.206.955) suara dan 57 kursi DPR. Kiprah elit politik ini disorot oleh media karena dianggap melenceng dari jati diri PKS sebagai partai dakwah dengan motto bersih, peduli dan profesional. (Qadir, 2013)

- 4) Periode 2010-2013 dipimpin Lutfi Hasan Ishaq setelah melakukan sidang Munas II di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2010 dan Hilmi Aminuddin kembali ditetapkan sebagai Ketua Majelis Syura. Masa jabatannya tidak lama karena tersandung kasus suap daging impor dan dijatuhi hukuman tahanan. PKS menganggap penahanan Lutfi ini banyak kejanggalan dan beranggapan untuk menghancurkan Islam Indonesia. Hal ini menjadi pukulan

untuk PKS mingingat ingin dilaksanakan pemilu 2014. Berbagai tudingpun bermunculan seperti SBY dalang penangkapan Lutfi menurut Fahri Hamzah.

- 5) Periode 2013-2015 dipimpin Anis Matta diangkat menjadi presiden PKS dan menghadapi masa pemilu 2014. Kemudian Anis Matta mengubah motto PKS sebelumnya “Bersih, Jujur, dan Adil” menjadi “Cinta, Kerja, dan Harmoni” untuk menghadapi pemilu dan menutupi kesalahan presiden PKS yang tertangkap. Pemilu 2014 menjadikan bukti pembuktian eksisnya PKS dengan menangkis tanggapan yang meragukan PKS. PKS mengalami penurunan suara 6.79% dan kursi DPR RI sebanyak 40.
- 6) Periode 2015-2020 dipimpin Sohibul Iman dan PKS melakukan pencopotan terhadap loyalis Anis Matta seperti mencopot jabatan Fahri Hamzah dari jenjang anggota PKS. Pemilu 2019 Menjelang 2019, PKS mengumumkan 9 kader sebagai calon capres atau cawapres yang diusulkan. PKS melakukan koalisi agar terpenuhi ambang batas. (Ihsanuddin, 2020)

Konflik internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sering dilanda persoalan internal politik yang harus menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu. Adapun konflik internal PKS diuraikan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Dilema partai terbuka

Pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS ke 13 di Bali tahun 2008 muncul pembahasan PKS jadi partai “terbuka”. Pemilihan tempat mukernas tidak mewakili parpol Islam hanya sekedar melakukan musyawarah dan memposisikan logo PKS di tengah Gapura dan muncul anggapan Mukernas beraroma agama Hindu. Mukernas memunyai tujuan untuk membahas strategi yang dihadapi PKS untuk pemilu 2009 dengan pilihan strategi PKS membuat parpol bersifat terbuka. Pilihan parpol terbuka mengalami pro dan kontra. Kelompok penolakan yaitu idealis (golongan keadilan umumnya menolak), progresif/pragmatis (kelompok sejahtera), serta kader muda seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah. (Nurdin, M.Amin, dkk, 2019) Wacana PKS menjadi parpol terbuka memberikan peluang kepada non muslim untuk menjadi kader dengan pandangan bahwa PKS menghargai keberagaman sebagai komitmen kepada Islam yang inklusif.

Tetapi hal ini menjadi pro dan kontra di tubuh PKS.

DPP PKS menanggapi terhadap parpol terbuka dengan penjelasan bahwa perlunya himbauan agar parpol terbuka tidak pernah sebagai keputusan akhir PKS. Pemikiran pro dan kontra kemudian dilanjutkan melalui forum *Multaqo Fikr* (bertukar pikiran) terkait parpol terbuka. PKS dilanda konflik mengenai wacana parpol terbuka terhadap kondisi politik praktis. Menjadi partai terbuka PKS menjadi leluasa penjejakan politik keberbagai kalangan. (Nurdin, M.Amin, dkk, 2019)

2) Pemecatan Yusuf Sufendi dan Perlawanan Terbuka

Yusuf supendi dan parpol PKS mengalami konflik yang berawal pada pemillihan dukungan pilpres 2004 dan suara terpecah mendukung Amin Rais sebagian lagi kepada Wiranto. Tetapi mayoritas mendukung Amin Rais. Kemudian di adakan rapat yang berulang oleh petinggi PKS, MPP, Dewan Syari;ah Pusat (DSP) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan hasil Amin Rais tetap superior, dan Majelis tetap membatalkan hasil akhir permusyawarahan. Akibat penentuan koalisi menyebabkan hubungan PKS dan yusuf Supendi semakin tajam hingga

terjadi pemeberian sanksi hukuman skorsing pada 26 Mei 2005. Pada 29 Oktober 2010 tewrjadi pemecatan Yusuf Supendi sebagai kader karena di anggap mengganggu permaisuri orang dan berujung perceraian.

Ada dugaan bahwa Yusuf menyelewengkan dana untuk bantuan anak yatim. Tetapi semua ini dibantah oleh yusuf karena diperlakukan tidak adil oleh DPP dan Yusuf merasa kecewa karena tidak memberikan peluang untuk pembelaannya. Yusuf melakukan penyerangan kepada PKS dengan membuka borok PKS. Misalnya Yusuf membuat laporan kepada KPK terkait penyelewengan dana parpol yang dilakukan Sekjen PKS yang dijabati oleh Anis Matta. Konflik PKS memberikan dampak adanya pengurangan pemilih akibat muncul argumen PKS yang dikenal bersih kini diragukan. (Nurdin, M.Amin, dkk, 2019) Adanya konflik internal PKS dengan Yusuf membuat publik mengetahui permasalahan yang terjadi dan menyebabkan berkurangnya perolehan suara. Dukungan melakukan koalisi mendapat hasil yang bersiteru yang akhirnya terjadi pemecatan yusuf dari parpol.

3) Pemecatan Fahri Hamzah dan Perlawanan

Fahri Hamzah populer dengan pendapat yang kontroversional, misalnya pernyataan ide rancangan pertimbangan hari santri nasional yang dilakukan oleh capres Jokowi di pilpres 2014 sebagai ide “sinting” yang ditulis pada twitter. Pernyataan ini berdampak negatif dengan aksi demo warga. Pernyataan lain Fahri bahwa ingin meniadakan KPK, pasang fisik terhadap proyek DPR, pembelaan kepada Setya Novanto, dan mencela populis yang menolak revisi KPK. Majelis Syuro mencermati komunikasi Fahri untuk diperbaiki dan terjadi permintaan mundur secara ikhlas dan diberi kedudukan strategi. Awalnya Fahri menyetujui mundur tetapi berubah setelah berpikir ulang dengan alasan menolak turun karena khawatir pertukaran akan mengurasi kursi PKS di DPR. Pada 26 Desember 2015 Fahri Hamzah diporkan ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) dan Fahri dinyatakan melakukan pelanggaran berat sehingga menimbulkan pengajuan pemberhentian Fahri Hamzah menjadi anggota PKS.

Mediasi dilakukan Fahri dan PKS namun sulit untuk menentukan titik tengah, dan pada 11 Maret 2016 Fahri diberhentikan dari jenjang anggota PKS dengan surat No. 02/PUT/MT-PKS/2016

dan keputusan hukum mengikat. Kursi Wakil ketua DPR digantikan oleh Ledia Hanifah Amaliah. Fahri mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan, dan upaya penggantian kursi Fahri terus didesak. Pada 3 Mei 2016 dilaksanakan sidang mediasi, kemudian 14 Desember 2016 pembacaan putusan yang memenangkan Fahri Hamzah dan mengembalikan statusnya. Pada hari putusan juga PKS melakukan banding ketingkat pengadilan lebih tinggi, kemudian 7 Desember 2017 adanya penolakan banding PKS dan mengembalikan status Fahri Hamzah. Hasil putusan berisikan untuk membayar dana 30 Miliar dan memperbaiki namanya. Parpol PKS melakukan banding hingga ada putusan yang memiliki hukum tetap. Fahri Hamzah melaporkan presiden PKS Sohibul Iman kepada polisi dengan anggapan mencemari nama baik. Akhirnya 30 Juli 2018, MA mengeluarkan putusan bahwa MA menolak sengketa PKS dan memenangkan Fahri Hamzah. (Nurdin, M.Amin, dkk, 2019)

KESIMPULAN

Runtuhnya orde baru masa Soeharto memberikan reformasi bagi keseluruhan, terutama bagi tumbuhnya parpol ke

permukaan dengan di atur oleh undang-undang. Terutama pengaturan terkait konflik internal parpol. Adanya pengaturan parpol, tetapi masih menimbulkan konflik baik internal maupun eksternal. Faksi menyebabkan pesekongkolan sebagian pemimpin elit parpol untuk melindungi kepentingan individu atau kedua belah pihak. Faksi dapat terjadi disejumlah partai, dan faksi akan mendorong perubahan jika tidak dilihat berdasarkan kepentingan sesaat dan kekuasaan semata. Faksi di tubuh parpol PKS menimbulkan konflik yang membuat kurangnya perolehan suara pada pemilu. Mislanya konflik PKS terkait kasus Yusuf dan Fahri Hamzah yang muncul ke publik. Majelis syuro dijadikan penengah antara yang berkonflik, namun masih ada kader yang mengabaikan posisi majelis syuro.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, Bab II, Pasal 5 dan Pasal 6.
- Budiarti, Aisyah Putri. (2017). Resume Faksi dan Konflik Intrnal Partai-Partai Politik Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Politik*, 14(2), 265–279.
- Budiarti, Aisyah Putri. (2018). Faksi dan Konflik Partai Politik di Indonesia Era Reformasi. Yayasan Pustaka Obor.
- Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, Bab III, Pasal 7.
- Ekawati, Esty. (2015). Koalisi Partai Islam di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 17–31.
- Efriza, 2012, *Political Explore-Sebuah kajian Ilmu Politik*, Bandung : Alfabeta, hlm 240.
- Ihsanuddin. (2020). “PKS, Partai Kader yang Tak Tergantung Pada Satu Sosok”.
<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2018/02/22/07511951/Pks-Partai-Kader-Yang-Tak-Tergantung-Pada-Satu-Sosok?Page=all>.
- Kamsi. (2017). Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia. Calpulis.
- Kartono, Kartini. (2017). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Rajawali Press.
- Nurdin, M.Amin, dkk. (2019). *Praha Partai Islam:Konparasi Konflik Internal PPP dan PKS*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Pieter de Wilde, (2010), How Politicisation Affects European Integration. Contesting the EU Budget in the Media and Parliaments of the Netherlands, Denmark and Ireland, Political Science, University of Oslo
- Qadir. (2013). HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Politik Indonesia. Jusuf Kalla School of Government.
- Rahmad, Imadun. (2011). Idiologi Poitik PKS: dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen. LKiS.
- Rahmat, M.Imdadun. (2008). Idiologi Politik PKS: dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen. LKiS.
- Rasid Pora, Konflik Elit Dalam Kontestasi Kekuasaan Internal Partai Politik (Studi Pada DPW Partai Amanat Nasional Propinsi Maluku Utara Tahun 2013), Journal of Governance and Public Policy(JGPP),Volume 1 No 1 April 2014, halaman 84
- Romli, Lili. (2017). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. Jurnal Politica, 8(2), 265–279.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. (n.d.).
- Yuniarti, Titin. (2016). Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera. Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 12(2).
- Zed, Mestika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan Edisi 2. Yayasan Obor Indonesia.